

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis statistik yang telah dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting.

1. Berdasarkan hasil uji t parsial, variabel kepemimpinan menunjukkan pengaruh positif dan sangat signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas PPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan nilai t hitung  $3,882 > t$  tabel  $2,008$  dan tingkat signifikansi  $p < 0,001$ .
2. Hasil pengujian parsial untuk variabel komunikasi menunjukkan pengaruh positif signifikan dengan t hitung  $3,021 > t$  tabel  $2,008$  dan nilai signifikansi  $0,004 < 0,05$ .
3. Variabel kemampuan kerja menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai dengan t hitung  $2,112 > t$  tabel  $2,008$  dan tingkat signifikansi  $0,040 < 0,05$ .
4. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai dengan t hitung  $2,980 > t$  tabel  $2,008$  dan nilai signifikansi  $0,004 < 0,05$ .
5. Berdasarkan hasil uji F, keempat variabel independen yaitu kepemimpinan, komunikasi, kemampuan kerja, dan kepuasan kerja secara bersama-sama

menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas PPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan F hitung  $30,853 > F$  tabel  $2,79$  dan tingkat signifikansi  $p < 0,001$ .

## 5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi strategis perlu diimplementasikan untuk mengoptimalkan kinerja pegawai di Kantor Dinas PPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara

1. Pengembangan Kepemimpinan Strategis Bidang Kependudukan Mengingat kepemimpinan memiliki pengaruh paling dominan, disarankan agar Kepala Dinas dan pejabat struktural di Dinas PPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara mengembangkan kompetensi kepemimpinan yang spesifik untuk sektor kependudukan.
2. Optimalisasi Komunikasi Program Kependudukan Untuk memperkuat aspek komunikasi dalam konteks pelayanan PPKB, Dinas perlu mengembangkan strategi komunikasi terintegrasi yang mencakup komunikasi internal antar unit kerja dan komunikasi eksternal dengan masyarakat. Implementasi sistem informasi manajemen PPKB yang memungkinkan sharing data real-time antar bidang, pengembangan media komunikasi digital untuk sosialisasi program KB, dan pelatihan teknik komunikasi persuasif untuk petugas lapangan menjadi agenda prioritas.
3. Peningkatan Kompetensi Teknis Bidang PPKB Berdasarkan temuan bahwa kemampuan kerja berpengaruh signifikan, Dinas PPKB perlu mengintensifkan program peningkatan kompetensi teknis pegawai yang spesifik untuk bidang

pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Program pelatihan yang disarankan meliputi: analisis dan proyeksi data kependudukan, teknik konseling KB dan kesehatan reproduksi, pengelolaan logistik kontrasepsi, serta pengoperasian aplikasi SIPENCAPIL dan DALAP. Kerjasama dengan BKKBN pusat dan institusi pendidikan untuk program sertifikasi profesi penyuluh KB dan analisis kependudukan perlu diprioritaskan.

4. Peningkatan Kepuasan Kerja melalui Sistem Reward Berbasis Kinerja Program Untuk mengoptimalkan kepuasan kerja pegawai Dinas PPKB, manajemen perlu merancang sistem reward yang terkait langsung dengan pencapaian target program kependudukan. Implementasi sistem penilaian kinerja berbasis achievement indicators seperti pencapaian target peserta KB baru, penurunan unmet need KB, dan akurasi data kependudukan dapat menjadi basis pemberian insentif dan pengakuan.
5. Agenda Penelitian Lanjutan untuk Sektor PPKB Mengingat masih terdapat 29,2% variabilitas kinerja yang belum dapat dijelaskan, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang mengeksplorasi faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi kinerja pegawai di sektor pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Variabel-variabel yang dapat diteliti meliputi: dukungan teknologi informasi kependudukan, kemitraan dengan organisasi masyarakat, tingkat resistensi masyarakat terhadap program KB, ketersediaan anggaran program, dan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan dan BPS.